

Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan

Otonomi Daerah Kabupaten Agam

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

Mardianiaty

BP. 06951007



JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI (EKSTENSI)

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010



No.Alumni Universitas

MARDIANIATY

No.Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl lahir: Padang, 17 Juni 1987 b). Nama Orang Tua: Umardi (Alm) dan Nurhayati c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 06 951 007 f). Tgl Lulus: 24 Mai 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3, i). Lama Studi: 3 tahun 9 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. By Pass Bukit Putus RT/RW 01/08 No.6 Kel. Pampangan Padang

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN AGAM

Skripsi SI Oleh: Mardianiaty

Pembimbing: Dr. Hefrizal Handra, M.Soc. Sc

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yang diukur dengan berbagai macam rasio derajat otonomi fiskal pemerintah daerah kota Surakarta pada aspek derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya atau posisi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Kemandirian pemerintah Kabupaten Agam masih relatif rendah karena pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. (2). Pemerintah daerah Kabupaten Agam memiliki kebutuhan fiskal yang besar. Hal ini terbukti dengan besarnya kebutuhan fiskal daerah dibandingkan dengan standar kebutuhan fiskal rata-rata se-Sumatera Barat baik untuk setiap tahunnya maupun secara rata-rata. (3). Pemerintah daerah Kabupaten Agam memiliki kapasitas fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal setelah otonomi daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Agam sudah mulai mampu memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya namun masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. (4). Posisi / upaya fiskal dari pemerintah daerah Kabupaten Agam yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB selama kurun waktu tiga tahun anggaran menunjukkan hasil lebih dari 1%.

Kata Kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Upaya

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 24 Mai 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc. Sc	Fery Andrianus, SE, M.Si	Sosmiarti, SE, M.Si

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec,DEA,Ing
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan Negara. Tujuan terbentuknya lembaga pemerintahan umumnya adalah untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas yang tujuannya bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan pelayanan dimasa yang akan datang.

Penggantian kepemimpinan di pemerintahan Indonesia sebagai besar banyak memberikan perubahan di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dari pemerintahan yang berbentuk sentralistik, yaitu pemerintahan yang bertujuan menjadikan Bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintahan terpusat, kemudian diganti dengan pemerintahan yang desentralistik. Hal ini sesuai dengan UU No.32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Selain itu juga dikeluarkan UU No.33 th 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No.25 th 1999 yang diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2002:3-9) yang menjadi alasan terjadi perubahan pemerintahan yang sentralistik kepada desentralistik adalah adanya intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu, sehingga menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas kehidupan demokrasi di daerah. Hal itu menyebabkan inisiatif dan parakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Pada pemerintahan yang berbentuk sentralistik kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih tergantung pada penerimaan yang berasal dari pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan Negara maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Menurut (Intan, 2009) pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (*service delivery*) pemerintah daerah (*local government*) kepada masyarakat (*social community*) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Agam setelah otonomi daerah* diduga masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Terlihat dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal, proporsi PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi sumbangan daerah. Meskipun setelah otonomi proporsi PAD terhadap TPD mengalami peningkatan, namun proporsi sumbangan daerah terhadap TPD juga meningkat dan tetap menominasi pendapatan daerah. Hal ini membuktikan masih rendahnya kinerja keuangan daerah, sehingga masih ada ketergantungan subsidi kepada pemerintah pusat.
2. Dari perhitungan kebutuhan fiskal menggunakan metode Sukanto, pemerintah daerah Kabupaten Agam memiliki kebutuhan fiskal yang lebih rendah pada masa setelah otonomi daerah dibandingkan sebelum otonomi daerah. Hal ini berbeda dengan kenyataan sebenarnya, seharusnya pada kenyataan kebutuhan fiskal lebih tinggi pada masa setelah otonomi daerah dibandingkan sebelum otonomi daerah.
3. Upaya fiskal Kabupaten Agam yang dihitung dari perubahan PAD terhadap PDRB secara rata-rata menunjukkan hasil lebih dari 1%, baik pada masa

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Agam dalam Angka*, berbagai edisi, Padang.
- _____, *Statistik Keuangan Indonesia*, berbagai edisi, Padang.
- _____, *Indikator Ekonomi Kabupaten Agam*, berbagai edisi, Padang.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Kuncoro, Mudrajat (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga
- Suparmoko (2000), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE
- Setiarti, L. (2002), "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : Studi di Kabupaten Bantul Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume III, No. 2, 141-152.
- Haryati, Sri (2006), "Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta". Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Sari, Monica (2009), "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi: Studi Kota Surakarta, Jawa Tengah". Skripsi Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Surakarta.
- Undang – Undang Otonomi Daerah 2004, Penerbit Absolut.